

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL KOLABORASI DALAM PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN

Puja Lestari¹, Dhiya Safriza Fahrina², Afrijal^{3*}

^{1,2,3}Universitas Syiah Kuala, Indonesia

¹ puja.lestari100122@gmail.com

² dhiyasafrizaa@gmail.com

afrijal@usk.ac.id

*Corespondensi Autor

Received: 21-02- 2026

Revised: 20-03-2026

Approved: 27-03-2026

ABSTRAK

Permasalahan sampah perkotaan berkembang menjadi isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola publik. Kompleksitas persoalan sampah mendorong perlunya pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan collaborative governance, mendeskripsikan hubungan dan peran antaraktor, serta menganalisis tantangan implementasi collaborative governance berdasarkan kajian literatur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal, prosiding konferensi, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian pada periode 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada berbagai database ilmiah, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan sampah perkotaan karena mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, dan partisipasi antaraktor. Keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, komunikasi yang efektif, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi collaborative governance masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kepentingan antaraktor. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model collaborative governance pada penanganan sampah perkotaan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kolaborasi, Tata Kelola, Persampahan, Perkotaan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah perkotaan berkembang menjadi isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan meningkatnya aktivitas ekonomi telah mendorong kenaikan volume sampah secara signifikan di berbagai kota di Indonesia (Wikurendra et al., 2024). Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teknis berupa keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir, tetapi juga memunculkan masalah sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang semakin kompleks. Sistem pengelolaan sampah yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif dan sektoral dinilai belum mampu menjawab dinamika persoalan persampahan perkotaan yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan (Putra & Dewi, 2025). Hidayanti & Efendi, (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah memerlukan

keterlibatan berbagai pihak karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja secara mandiri dalam menangani peningkatan volume sampah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis kebersihan kota, tetapi telah berkembang menjadi isu tata kelola publik yang membutuhkan pola koordinasi lintas sektor.

Peningkatan timbulan sampah perkotaan juga dipengaruhi oleh pola urbanisasi yang terus berlangsung pada berbagai wilayah di Indonesia. Kawasan perkotaan menjadi pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, industri jasa, dan mobilitas masyarakat sehingga menghasilkan volume sampah yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan. Kompleksitas tersebut semakin tinggi ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pengolahan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi (Darusasi et al., 2026). Saputra, Santosa, dan Adiwisastro (2025) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung menghadapi persoalan peningkatan timbulan harian sampah dan keterbatasan kapasitas pengolahan sehingga membutuhkan penguatan *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat (Bonti et al., 2024). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kemampuan birokrasi pemerintah, melainkan juga pada kualitas hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah.

Pendekatan *collaborative governance* berkembang sebagai salah satu model tata kelola yang dinilai mampu menjawab persoalan publik yang bersifat multidimensional. *Collaborative governance* menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lingkungan, akademisi, media, dan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan publik (Agung, 2025). Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa penyelesaian masalah publik tidak dapat dilakukan secara hierarkis dan tertutup, melainkan membutuhkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan kapasitas berbeda. Murti, (2024) menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta muncul karena meningkatnya persoalan sampah yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemerintah daerah semata. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif, ketergantungan antaraktor, serta komitmen bersama menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola pengelolaan sampah yang efektif.

Kehadiran *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan menjadi relevan karena sistem pengelolaan sampah melibatkan rantai aktivitas yang panjang, mulai dari pengurangan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Setiap tahapan tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan sektor swasta dalam penyediaan teknologi dan pembiayaan, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (Mahandry & Taryana, 2025). Organisasi masyarakat sipil dan komunitas lingkungan juga berperan dalam meningkatkan edukasi serta pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Hayamadi et al., (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Surakarta membutuhkan pendekatan kolaboratif karena

persoalan sampah melibatkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan secara bersamaan. Pola kolaborasi mampu memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif.

Implementasi *collaborative governance* pada pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kepercayaan antaraktor, perbedaan kepentingan kelembagaan, lemahnya komitmen bersama, keterbatasan sumber daya, hingga belum optimalnya mekanisme koordinasi antarinstansi. Situasi tersebut menyebabkan berbagai program pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Hidayanti dan Efendi (2021) menemukan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan telah memenuhi unsur kolaborasi, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kolaborasi tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas kebijakan apabila tidak diikuti dengan kesamaan tujuan, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih memperlihatkan ketidakefektifan koordinasi antaraktor dalam implementasi *collaborative governance*. Penelitian Pamungkas et al., (2024) mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Jember menemukan bahwa keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor nonpemerintah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan koordinasi dan pembagian peran antarpihak. Penelitian Yustika & Hertati, (2024) di Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis refuse derived fuel (RDF) menghadapi kendala kapasitas pengolahan yang masih rendah meskipun telah melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Sementara itu, penelitian Arif et al., (2024) mengenai pengelolaan sampah di Jakarta Timur memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kepercayaan antaraktor, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Studi di atas memperlihatkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi persoalan pada aspek koordinasi kelembagaan, efektivitas kolaborasi, serta keberlanjutan partisipasi publik

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus empiris pada wilayah tertentu dengan fokus pada implementasi program pengelolaan sampah. Alghifari & Muhtar, (2026) dalam penelitiannya mengenai *collaborative governance* di Kota Bandung menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan program KangPisMan. Koordinasi antaraktor menjadi unsur penting dalam menciptakan efektivitas pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung berfokus pada praktik implementasi kebijakan di daerah tertentu sehingga belum banyak mengkaji secara komprehensif mengenai model *collaborative*

governance yang dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Kajian mengenai *collaborative governance* juga memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, kepercayaan, komunikasi, pembagian peran, serta partisipasi masyarakat. Studi Syahranti & Hasmira, (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah karena masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, melainkan aktor utama dalam proses pengurangan sampah, dalam hal ini tata kelola kolaboratif membutuhkan ruang partisipasi yang terbuka dan mekanisme koordinasi yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Tanpa partisipasi masyarakat yang kuat, berbagai program pengelolaan sampah berpotensi mengalami hambatan dalam tahap implementasi.

Persoalan lain yang muncul dalam pengelolaan sampah perkotaan berkaitan dengan lemahnya integrasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Banyak program pengelolaan sampah masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan program pengurangan sampah sering kali hanya berorientasi jangka pendek dan belum menyentuh aspek perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. *Collaborative governance* memerlukan kepemimpinan yang mampu membangun kesepahaman antarpihak serta menciptakan insentif bersama agar setiap aktor memiliki komitmen terhadap tujuan kolaborasi. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh struktur formal kerja sama, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas relasi sosial dan komunikasi antaraktor (Prabowo et al., 2025).

Ansell & Gash, (2008) memandang *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan bersama antara lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus. Emerson kemudian mengembangkan konsep *collaborative governance* regime yang menekankan dinamika kolaborasi melalui kepemimpinan, interdependensi, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan kolektif. Perkembangan konsep tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama administratif, tetapi juga sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan, pembentukan kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab antaraktor.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa *collaborative governance* memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hayamadi dkk. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berkelanjutan melalui koordinasi kebijakan, edukasi masyarakat, dan penguatan partisipasi publik. Hidayanti dan Efendi (2021) menjelaskan bahwa *collaborative governance* mampu memperkuat akses terhadap sumber daya dan informasi dalam pengelolaan TPA regional. Saputra et al., (2026) juga menemukan bahwa *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan persampahan di Kota Bandung. Hasil studi tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan yang

relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan yang semakin lengkap.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memperlihatkan adanya kesenjangan kajian, terutama berkaitan dengan analisis model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada evaluasi program atau implementasi kebijakan pada wilayah tertentu, sedangkan kajian yang memetakan model kolaborasi secara konseptual melalui pendekatan kepustakaan masih relatif terbatas. Penelitian kepustakaan menjadi penting karena mampu memberikan sintesis teoritis dan empiris mengenai pola hubungan antaraktor, faktor pendukung kolaborasi, tantangan implementasi, serta model *collaborative governance* yang relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Kajian kepustakaan juga dapat menghasilkan pemetaan konsep yang lebih komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan maupun rekomendasi kebijakan.

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan masih didominasi oleh studi implementasi pada daerah tertentu sehingga belum memberikan gambaran konseptual yang komprehensif mengenai pola kolaborasi antaraktor. Kajian yang mengintegrasikan faktor kepemimpinan, komunikasi, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan hubungan antarpemangku kepentingan dalam satu kerangka *collaborative governance* juga masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan keberhasilan program pengelolaan sampah, sedangkan analisis mengenai tantangan dan hambatan kolaborasi secara sistematis belum banyak dibahas secara mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini perlu dilakukan karena persoalan sampah perkotaan membutuhkan pendekatan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menempatkan kolaborasi antaraktor sebagai elemen utama dalam penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan berdasarkan kajian literatur, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan, mendeskripsikan hubungan dan peran antaraktor dalam *collaborative governance* pada penanganan sampah perkotaan dan menganalisis tantangan implementasi *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan berdasarkan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

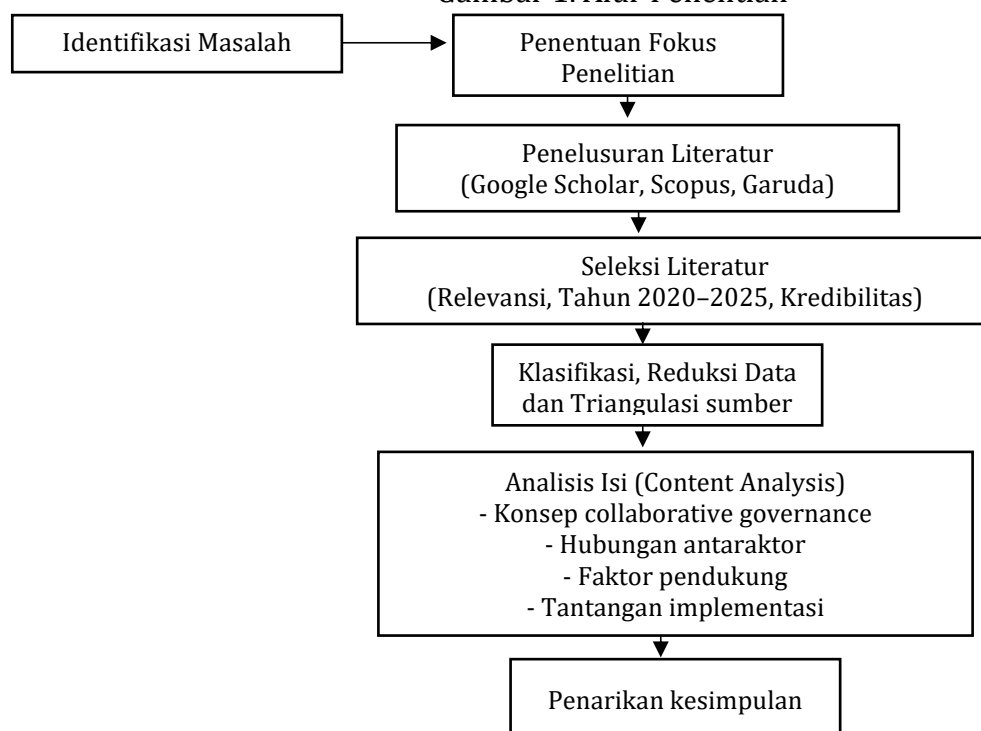
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Zed, 2004). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep, pola hubungan antaraktor, dinamika kolaborasi, serta model *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan berdasarkan berbagai kajian ilmiah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh sintesis teoritis dan empiris mengenai *collaborative governance* sehingga dapat menghasilkan pemetaan konsep dan analisis yang komprehensif terhadap tata kelola penanganan sampah perkotaan. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, buku ilmiah, laporan penelitian, serta

dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan pengelolaan sampah perkotaan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi periode 2020–2025 agar data dan temuan penelitian lebih aktual dan relevan dengan perkembangan pengelolaan sampah perkotaan saat ini. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, serta keterkaitan pembahasan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Penelusuran dilakukan menggunakan beberapa kata kunci seperti “*collaborative governance*”, “pengelolaan sampah perkotaan”, “urban waste management”, “tata kelola kolaboratif”, dan “partisipasi masyarakat”. Literatur yang ditemukan kemudian melalui tahapan identifikasi, seleksi, reduksi, dan klasifikasi sesuai fokus penelitian sehingga hanya sumber yang relevan dan memiliki kualitas ilmiah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola hubungan antaraktor, bentuk kolaborasi, faktor pendukung keberhasilan, serta tantangan implementasi *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menghasilkan sintesis mengenai model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, teori, dan dokumen kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Gambar 1. Alur Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Collaborative Governance* dalam Penanganan Sampah Perkotaan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam penanganan sampah perkotaan karena persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Permasalahan sampah perkotaan melibatkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor secara bersama-sama (Hidayanti & Efendi, 2021). Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa *collaborative governance* diterapkan melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, media, dan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah (Hayamadi et al., 2024).

Model *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan umumnya dibangun melalui proses koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antaraktor. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penyusun kebijakan, sedangkan sektor swasta berkontribusi dalam penyediaan teknologi dan dukungan pembiayaan pengelolaan sampah (Saputra et al., 2026). Masyarakat dan komunitas lingkungan memiliki peran penting dalam pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah, bank sampah, dan edukasi lingkungan. Keterlibatan seluruh aktor mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah karena setiap pihak memiliki sumber daya dan kapasitas yang saling melengkapi. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa *collaborative governance* yang efektif ditandai oleh adanya komunikasi yang terbuka, kepercayaan antaraktor, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berorientasi pada pembagian tugas, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama (Hayamadi et al., 2024). Klasifikasi aktor dan bentuk peran pada Tabel 1 diperoleh melalui proses kategorisasi data hasil kajian literatur yang relevan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan

Tabel 1. Model *Collaborative Governance* dalam Penanganan Sampah Perkotaan

Aktor	Bentuk Peran	Sumber
Pemerintah	Regulasi, koordinasi, dan fasilitasi program	Hidayanti dan Efendi (2021)
Sektor Swasta	Penyediaan teknologi dan dukungan pembiayaan	Saputra dkk. (2025)
Masyarakat	Pemilahan dan pengurangan sampah	(Kurhayadi, 2021)
Komunitas/LSM	Edukasi dan pendampingan masyarakat	Hayamadi dkk. (2024)
Akademisi	Kajian dan rekomendasi kebijakan	(Sabarna & Ramdani, 2025)
Media	Sosialisasi program lingkungan	Hayamadi dkk. (2024)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kajian literatur, 2026.

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan melibatkan berbagai aktor yang memiliki fungsi

dan tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah memiliki peran utama dalam penyusunan regulasi, koordinasi kebijakan, serta fasilitasi program pengelolaan sampah. Peran tersebut menjadi penting karena pemerintah berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan penghubung antaraktor dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan (Hidayanti & Efendi, 2021). Sektor swasta berkontribusi melalui penyediaan teknologi pengolahan sampah, dukungan pembiayaan, dan pengembangan inovasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Saputra dkk., 2025).

Masyarakat memiliki posisi penting dalam *collaborative governance* karena menjadi aktor utama dalam proses pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan pemilahan sampah rumah tangga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan (Kurhayadi, 2021). Komunitas lingkungan dan organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukasi, kampanye lingkungan, dan pendampingan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Hayamadi dkk., 2024).

Akademisi memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian, pengembangan konsep, serta rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah perkotaan (Sabarna & Ramdani, 2025). Media memiliki fungsi penting dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mendukung sosialisasi program pengelolaan sampah kepada masyarakat luas (Hayamadi dkk., 2024).

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* membentuk hubungan kerja sama yang bersifat interdependensi antaraktor. Setiap aktor memiliki sumber daya, kapasitas, dan kepentingan yang berbeda sehingga keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan di antara seluruh pihak yang terlibat. *Collaborative governance* tidak hanya menekankan pembagian tugas, tetapi juga menempatkan partisipasi, kepercayaan, dan komitmen bersama sebagai dasar utama dalam menciptakan pengelolaan sampah perkotaan yang efektif

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan *Collaborative Governance*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui proses identifikasi dan klasifikasi data dari berbagai penelitian mengenai *collaborative governance* dan pengelolaan sampah perkotaan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan. Faktor pertama adalah kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, menyatukan kepentingan, dan memperkuat komitmen antaraktor (Sabarna & Ramdani, 2025). Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan koordinasi yang baik sehingga program pengelolaan sampah dapat berjalan

secara optimal. Faktor kedua adalah kepercayaan antaraktor. *Collaborative governance* membutuhkan hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya agar kerja sama dapat berjalan secara efektif (Hidayanti & Efendi, 2021). Tingkat kepercayaan yang rendah sering kali menyebabkan lemahnya koordinasi dan munculnya konflik kepentingan antaraktor. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat memperkuat hubungan antaraktor dalam *collaborative governance*. Penanganan sampah perkotaan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat karena sumber utama timbulan sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan pengelolaan bank sampah menjadi indikator penting keberhasilan *collaborative governance* (Saputra et al., 2026).

Faktor berikutnya yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance* adalah ketersediaan sumber daya. Implementasi *collaborative governance* membutuhkan dukungan anggaran, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai agar program pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, minimnya armada pengangkutan, rendahnya kapasitas teknologi pengolahan sampah, serta keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai program pengelolaan sampah belum mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dukungan sumber daya yang memadai menjadi penting karena *collaborative governance* tidak hanya membutuhkan koordinasi antaraktor, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan yang mampu mendukung implementasi kebijakan secara nyata (Saputra et al., 2026).

Keberhasilan *collaborative governance* juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antaraktor. Komunikasi yang terbuka dan intensif mampu memperkuat koordinasi, membangun kesepahaman, serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Proses komunikasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, dan penyelarasan tujuan antaraktor sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya, lemahnya komunikasi sering kali menyebabkan terjadinya miskomunikasi, rendahnya kepercayaan, dan ketidaksinambungan program pengelolaan sampah.

Selain komunikasi, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam *collaborative governance* karena masyarakat merupakan sumber utama timbulan sampah perkotaan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, pengelolaan bank sampah, dan program kebersihan lingkungan menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan dan mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah. Berbagai faktor tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* membutuhkan keterpaduan antara kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan sumber daya agar pengelolaan sampah perkotaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk dasar utama dalam menciptakan tata kelola pengelolaan sampah yang partisipatif. Identifikasi faktor keberhasilan

collaborative governance pada Tabel 2 dilakukan melalui sintesis berbagai penelitian terdahulu yang membahas efektivitas pengelolaan sampah berbasis kolaborasi.

Tabel 2. Faktor Keberhasilan *Collaborative Governance*

Faktor	Penjelasan	Sumber
Kepemimpinan kolaboratif	Memperkuat koordinasi dan komitmen antaraktor	Nugraha Sabarna dan Ramdani (2024)
Kepercayaan antaraktor	Mendorong kerja sama yang efektif	Hidayanti dan Efendi (2021)
Partisipasi masyarakat	Mendukung pengurangan sampah dari sumber	Kurhayadi (2021)
Ketersediaan sumber daya	Menunjang implementasi program pengelolaan sampah	Hayamadi dkk. (2024)
Komunikasi	Memperkuat hubungan dan koordinasi antaraktor	Saputra dkk. (2025)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kajian literatur, 2026.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas *collaborative governance*. Kepemimpinan yang baik akan memperkuat komunikasi dan meningkatkan kepercayaan antaraktor. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Hubungan dan Peran Antaraktor dalam *Collaborative Governance*

Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa hubungan antaraktor dalam *collaborative governance* bersifat interdependen karena setiap aktor memiliki sumber daya, kapasitas, dan fungsi yang berbeda dalam penanganan sampah perkotaan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan, bentuk kerja sama, serta distribusi peran antaraktor yang ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan membentuk hubungan interdependensi antaraktor. Setiap aktor memiliki peran dan sumber daya yang berbeda sehingga membutuhkan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Hayamadi dkk., 2024). Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan program pengelolaan sampah. Sektor swasta mendukung pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah. Masyarakat menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengurangan sampah dari sumbernya (Saputra dkk., 2025).

Komunitas lingkungan dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukasi dan pendampingan lingkungan (Kurhayadi, 2021). Akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah (Nugraha Sabarna dan Ramdani, 2024). Media berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Hayamadi dkk., 2024). Pemetaan hubungan dan peran antaraktor pada Tabel 3 disusun berdasarkan hasil analisis

isi terhadap berbagai penelitian mengenai collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan.

Tabel 3. Hubungan dan Peran Antaraktor

Aktor	Peran	Sumber
Pemerintah Daerah	Penyusun kebijakan dan koordinator program	Hidayanti dan Efendi (2021)
Sektor Swasta	Penyedia teknologi dan investasi	Saputra dkk. (2025)
Masyarakat	Pengurangan dan pemilahan sampah	Kurhayadi (2021)
Komunitas Lingkungan	Edukasi dan pemberdayaan masyarakat	Hayamadi dkk. (2024)
Akademisi	Penelitian dan rekomendasi kebijakan	Nugraha Sabarna dan Ramdani (2024)
Media	Sosialisasi dan kampanye lingkungan	Hayamadi dkk. (2024)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kajian literatur, 2026.

Hubungan dan peran antaraktor pada Tabel 3 menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan dibangun melalui keterlibatan berbagai pihak yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah daerah berperan sebagai penyusun kebijakan, pengatur regulasi, dan koordinator program pengelolaan sampah sehingga memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses kolaborasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan (Hidayanti dan Efendi, 2021). Pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membangun kerja sama antaraktor melalui penyediaan kebijakan, program, dan dukungan kelembagaan (Panjaitan et al., 2019).

Sektor swasta memiliki kontribusi penting dalam penyediaan teknologi, investasi, dan inovasi pengelolaan sampah. Keterlibatan sektor swasta diperlukan karena pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur dalam pengelolaan sampah perkotaan (Jannah et al., 2025). Dukungan teknologi pengolahan sampah, sistem daur ulang, serta pembiayaan program lingkungan menjadi bentuk kontribusi sektor swasta dalam *collaborative governance* (Saputra dkk., 2025).

Masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, kegiatan daur ulang, dan pengurangan penggunaan plastik menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan (Kurhayadi, 2021). Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berorientasi pada kebijakan pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam penyelesaian persoalan sampah (Wibisono & Widyastuti, 2026).

Komunitas lingkungan dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, kampanye lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan (Hayamadi dkk., 2024). Akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan

sistem pengelolaan sampah perkotaan (Nugraha Sabarna dan Ramdani, 2024). Media memiliki fungsi penting dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antaraktor yang bersifat partisipatif, terbuka, dan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Setiap aktor memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan agar tujuan bersama dapat tercapai. Hubungan yang bersifat sektoral dan tertutup justru menyebabkan lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta menurunnya keberlanjutan program pengelolaan sampah. *Collaborative governance* pada akhirnya menjadi pendekatan yang menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang efektif, partisipatif.

Tantangan Implementasi *Collaborative Governance* dalam Penanganan Sampah Perkotaan

Hasil analisis literatur juga menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, sosial, dan teknis. Tantangan tersebut diperoleh melalui proses reduksi dan interpretasi data dari berbagai penelitian yang membahas hambatan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dan masih membuang sampah secara sembarangan (Kurhayadi, 2021).

Tantangan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Pengelolaan sampah sering kali berjalan secara sektoral sehingga menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakefektifan program (Hidayanti dan Efendi, 2021). Keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan juga menjadi hambatan penting dalam pengelolaan sampah perkotaan. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan armada pengangkutan, fasilitas pengolahan sampah, dan teknologi pengelolaan sampah modern (Hayamadi dkk., 2024). Perbedaan kepentingan antaraktor turut menjadi tantangan dalam *collaborative governance*. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda sehingga proses pengambilan keputusan sering kali membutuhkan waktu yang panjang (Nugraha Sabarna dan Ramdani, 2024). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, *collaborative governance* tetap menjadi pendekatan yang relevan dalam penanganan sampah perkotaan karena mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dan mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian persoalan sampah secara berkelanjutan (Hayamadi dkk., 2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *collaborative governance* dalam penanganan sampah perkotaan dibangun melalui keterlibatan berbagai

aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, dan media yang saling bekerja sama dalam proses pengelolaan sampah. Collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan karena persoalan sampah perkotaan memiliki kompleksitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Model collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan dilaksanakan melalui koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan komitmen bersama antaraktor untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antaraktor, komunikasi yang efektif, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sumber daya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Kepemimpinan yang baik mampu memperkuat koordinasi dan membangun komitmen bersama, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan sumber utama timbulan sampah perkotaan.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan dan peran antaraktor dalam collaborative governance bersifat interdependensi. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan dan koordinator program, sektor swasta berkontribusi dalam penyediaan teknologi dan pembiayaan, masyarakat berperan dalam pengurangan dan pemilahan sampah, komunitas lingkungan melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, akademisi memberikan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan, sedangkan media mendukung sosialisasi program pengelolaan sampah. Hubungan yang bersifat kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan, serta perbedaan kepentingan antaraktor. Meskipun demikian, collaborative governance tetap menjadi pendekatan yang efektif karena mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian persoalan sampah perkotaan secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui sintesis berbagai literatur mengenai collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian dan kebijakan pengelolaan sampah di masa mendatang

REFERENSI

- Agung, M. F. M. (2025). Strategi Collaborative Governance Dalam Reformasi Pelayanan Publik. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 11(1), 18–26.
- Alghifari, N., & Muhtar, E. A. (2026). Collaborative Governance Pada Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah Kota Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 101–113.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arif, M. N. M., Subowo, A., & Kismartini. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4), 169–185.
- Bonti, Bekti, H., Utami, S. B., Setiawan, T., Pancasilawan, R., & Halim, H. A. (2024). Membangun Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 5(1), 1934.
- Darusasi, R., Renggani, P., & Aisy, U. R. (2026). Analisis Tren Dinamika Penduduk dan Timbulan Sampah di Kota Yogyakarta. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 8371–8382.
- Hayamadi, P. S., Sembodo, A. N. B., Suprapdi, E. D. A. P., & Kamal, U. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan di Kota Surakarta. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5), 66–82.
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2021). Praktik Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), 34–40.
- Jannah, G. R., Faradzilla, A. R., Naim, N. N., Septyano, M. P., Athifah, K. L. N., Febiyanti, N., Yudhistira, K. Y., Puspa, P. C., & Roesnia, O. A. (2025). Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Kepatuhan Hukum Terhadap Masalah Sampah di Lingkungan Sekitar Sungai. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 10–19.
- Kurhayadi. (2021). Collaborative Governance in Waste Management in Bandung City. *International Journal of Science and Society*, 3(4), 236–244.
- Mahandry, S. P., & Taryana, A. (2025). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 264–277.
- Murti, O. G. P. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pamungkas, T. S., Masqurin, S. N., & Sutomo. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 905–914.
- Panjaitan, H. M., Jaenuri, M. . A., Moenek, R., & Sinurat, M. (2019). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jakarta. *Visioner*, 11(4), 505–515.
- Prabowo, S., Subagyo, Ag., & Nuradhawati, R. (2025). Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bandung. *Jurnal Prinsip*, 2(1), 136–149.
- Putra, R. P., & Dewi, V. A. K. (2025). *Sampah Organik dalam Perspektif Geografi Lingkungan*. PT. Insan Cendekia Mandiri Group.

- Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). Collaborative governance in waste management: a case study in the municipality of Yogyakarta, Indonesia. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1).
- Saputra, G. W., Santosa, P., & Adiwisastro, J. (2026). Efektivitas Kebijakan Sampah Kota Bandung: Peran Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 8(1), 207–216.
- Syahranti, Z., & Hasmira, M. H. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilahan Sampah Organik Masyarakat pada Pengelolaan Lubang Resapan Biopori di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 8(4), 543–555.
- Wibisono, D. E., & Widyastuti, A. E. S. (2026). Model Collaborative Governance untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Yogyakarta: Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Batasan Regulasi. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 10(1), 132–144.
- Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G. (2024). Urbanization and Benefit of Integration Circular Economy into Waste Management in Indonesia: A Review. *Circular Economy and Sustainability*, 4, 1219–1248.
- Yustika, S. M., & Hertati, D. (2024). Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Co Firing di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 20–29.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.